

Menjembatani Investasi: Ditjen PKH Mengurai Hambatan Regulasi untuk Perkuat Subsektor Peternakan

***Bridging Investment:
The Directorate General of Livestock and Animal Health Addresses
Regulatory Barriers to Strengthen the Livestock Subsect***



Gravita Puji Lestari, S.Pt
Penelaah Teknis Kebijakan

Pemerintah terus berupaya mengakselerasi iklim investasi di sektor strategis, salah satunya adalah subsektor peternakan. Dalam rangka mendukung investasi, khususnya pada komoditas sapi perah dan sapi potong, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) Kementerian Pertanian mengambil langkah proaktif sebagai fasilitator utama.

Menyadari bahwa proses perizinan sebagai langkah awal untuk meningkatkan laju investasi, Direktorat Hilirisasi Hasil Peternakan telah menggelar Focus Group Discussion (FGD) khusus. Acara yang bertajuk "Kupas Tuntas Perizinan Dasar Dalam Perizinan Berusaha Subsektor Peternakan" ini dilaksanakan pada 6 November 2025. FGD ini menjadi bagian penting dari rangkaian acara Nusantara Livestock & Poultry Expo, yang diselenggarakan di International Convention Exhibition (ICE) BSD City.

The government continues to strive to accelerate the investment climate in strategic sectors, one of which is the livestock subsector. In support of investment, particularly in the dairy and beef cattle commodities, the Directorate General of Livestock and Animal Health (Ditjen PKH) of the Ministry of Agriculture has taken a proactive role as a key facilitator.

Recognising that licensing processes are a crucial initial step in boosting investment momentum, the Directorate of Downstream Livestock Products organised a dedicated Focus Group Discussion (FGD). The event, titled "A Comprehensive Review of Basic Licensing in Business Permits for the Livestock Subsector," was held on 6 November 2025. This FGD formed an integral part of the Nusantara Livestock & Poultry Expo series, which took place at the International Convention Exhibition (ICE) BSD City.



Forum Strategis Multi-Pihak

Tujuan utama dari FGD ini yaitu menjadi wadah untuk memfasilitasi pembahasan mendalam mengenai berbagai permasalahan perizinan dasar. Forum ini secara khusus mempertemukan para pelaku usaha di bidang sapi perah dan sapi pedaging dengan jajaran pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Keberhasilan sebuah investasi di lapangan tidak hanya bergantung pada regulasi di tingkat pusat. Oleh karena itu, FGD ini menghadirkan formasi pemangku kepentingan yang komprehensif. Hadir sebagai narasumber dan fasilitator adalah perwakilan dari kementerian-kementerian yang menangani perizinan dasar, di antaranya:

- Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)
- Kementerian Lingkungan Hidup (KLHK)

Selain itu, hadir pula perwakilan dari internal Kementerian Pertanian, yakni dari Ditjen Lahan dan Irigasi Pertanian, serta perwakilan Eselon II lingkup Ditjen PKH. Yang tidak kalah penting, forum ini juga melibatkan secara aktif perwakilan dari pemerintah daerah yang menjadi lokasi utama investasi. Tercatat perwakilan dari Dinas Peternakan tingkat Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah, serta jajaran pemerintah kabupaten dari Bogor, Tegal, Blitar, Malang, dan Cianjur turut hadir untuk memberikan perspektif lapangan dan mencari solusi bersama.

A Strategic Multi-Stakeholder Forum

The primary objective of this FGD was to serve as a platform for facilitating in-depth discussions on various issues related to basic licensing. The forum specifically brought together business actors in the dairy and beef cattle sectors with government representatives at both central and regional levels.

The success of an investment on the ground does not depend solely on regulations at the central level. For this reason, the FGD featured a comprehensive configuration of stakeholders. Serving as speakers and facilitators were representatives from ministries responsible for basic licensing, including:

- *Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning*
- *Ministry of Public Works and Public Housing*
- *Ministry of Environment and Forestry*

In addition, representatives from within the Ministry of Agriculture were also present, namely from the Directorate General of Agricultural Land and Irrigation, as well as Echelon II officials within the Directorate General of Livestock and Animal Health (Ditjen PKH). Equally important, the forum actively involved representatives from regional governments that serve as key investment locations. Participants included representatives from the Provincial Livestock Services of East Java and Central Java, as well as officials from the regency governments of Bogor, Tegal, Blitar, Malang, and Cianjur, who contributed on-the-ground perspectives and jointly sought practical solutions.



Mengidentifikasi Tantangan di Hulu Perizinan

Dalam diskusi yang berlangsung terbuka dan konstruktif, para pelaku usaha memaparkan berbagai kendala faktual yang mereka hadapi di lapangan. Paparan ini memberikan gambaran jelas mengenai tantangan-tantangan utama yang perlu segera diatasi untuk melancarkan investasi. Beberapa isu yang mengemuka dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori besar:

1. Tantangan Kesesuaian Tata Ruang dan Status Lahan

Isu tata ruang ini menjadi salah satu hambatan yang perlu diurai. Beberapa investor menghadapi situasi di mana lahan yang telah disiapkan ternyata masuk dalam kategori Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) atau Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B). Status ini seringkali tidak memperbolehkan adanya kegiatan peternakan skala industri, meskipun peternakan adalah bagian integral dari pertanian. Selain itu, ada pula kasus di mana lahan yang potensial beririsan dengan status kawasan kehutanan, atau terbentur pada aturan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) terkait Koefisien Dasar Bangunan (KDB) dan Koefisien Daerah Hijau (KDH). Bahkan, muncul persepsi di beberapa daerah yang mengklasifikasikan peternakan sebagai "non-pertanian", sehingga menyulitkan proses izin lingkungan dan KKPR.

2. Kompleksitas Perizinan Lingkungan dan Bangunan

Bagi usaha yang sudah berjalan (eksisting), tantangan datang dari pemenuhan izin-izin baru. Banyak bangunan operasional yang telah berdiri sebelum regulasi modern terbit, kini diharuskan memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF). Proses ini menuntut adanya kajian teknis struktur bangunan oleh pengkaji bersertifikat, yang menjadi tantangan tersendiri.



Identifying Upstream Licensing Challenges

In an open and constructive discussion, business actors outlined various factual obstacles encountered in the field. These presentations provided a clear picture of the main challenges that must be addressed promptly to facilitate investment. The issues raised can be grouped into three major categories:

1. Spatial Planning Compatibility and Land Status Challenges

Spatial planning issues emerged as one of the key barriers requiring resolution. Several investors face situations where land that has already been prepared is classified as Sustainable Food Agricultural Land (LP2B) or Sustainable Food Agricultural Areas (KP2B). This status often does not permit industrial-scale livestock activities, even though livestock farming is an integral part of agriculture. In addition, there are cases where potential land overlaps with forest area status or is constrained by Regional Spatial Planning (RTRW) regulations related to the Building Coverage Ratio (KDB) and Green Area Ratio (KDH). In some regions, there is even a perception that livestock farming is categorised as "non-agricultural," complicating environmental permitting and the issuance of KKPR.

2. Complexity of Environmental and Building Permits

For existing businesses, challenges arise from the requirement to comply with new permits. Many operational buildings constructed before the issuance of modern regulations are now required to obtain Building Approval (PBG) and a Certificate of Functional Feasibility (SLF). This process requires a technical structural assessment by certified assessors, which poses its own challenges.

Di sisi lingkungan, perusahaan diwajibkan mengurus persetujuan teknis (Pertek) dan mengintegrasikannya ke dalam dokumen persetujuan lingkungan yang sudah ada. Bagi usaha yang terlanjur beroperasi sebelum melengkapi izin lingkungan, terdapat potensi sanksi administratif yang perlu dimediasi. Optimalisasi pengelolaan limbah, seperti pemanfaatan gas metan, juga menjadi sorotan yang memerlukan arahan teknis lebih lanjut.

2. Kompleksitas Perizinan Lingkungan dan Bangunan

Bagi usaha yang sudah berjalan (eksisting), tantangan datang dari pemenuhan izin-izin baru. Banyak bangunan operasional yang telah berdiri sebelum regulasi modern terbit, kini diharuskan memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF). Proses ini menuntut adanya kajian teknis struktur bangunan oleh pengkaji bersertifikat, yang menjadi tantangan tersendiri.

3. Harmonisasi Regulasi dan Aspek Sosial

Kendala lain yang muncul adalah sinkronisasi regulasi. Ditemukan adanya sistem perizinan tersendiri di tingkat provinsi yang dirasa tumpang tindih dengan sistem Online Single Submission (OSS) dan Amdalnet di tingkat pusat. Perubahan regulasi, seperti peralihan kewenangan izin Penanaman Modal Asing (PMA) dari pusat ke provinsi, juga menuntut penyesuaian proses bagi pelaku usaha. Dari aspek sosial, beberapa calon investor menghadapi permintaan dari warga di sekitar lokasi farm, seperti permintaan kompensasi, pembangunan fasilitas umum, hingga penyerapan tenaga kerja. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan sosial dan kesepakatan dengan masyarakat sekitar adalah kunci penting yang tidak bisa diabaikan.



On the environmental side, companies are required to obtain Technical Approvals (Pertek) and integrate them into existing environmental approval documents. For businesses that have already been operating without complete environmental permits, there is a potential risk of administrative sanctions that need to be mediated. The optimisation of waste management, such as the utilisation of methane gas, also emerged as a key issue requiring further technical guidance.

3. Regulatory Harmonisation and Social Aspects

Another challenge identified was regulatory synchronisation. Separate licensing systems were found at the provincial level that are perceived to overlap with the central Online Single Submission (OSS) system and Amdalnet. Regulatory changes, such as the transfer of authority for Foreign Direct Investment (FDI/PMA) licensing from the central government to the provinces, also require process adjustments by business actors. From a social perspective, some prospective investors face demands from communities surrounding farm locations, including requests for compensation, construction of public facilities, and local labour absorption. This highlights that a social approach and agreements with surrounding communities are critical elements that cannot be overlooked.



Langkah Maju: Rumusan Solusi dan Tindak Lanjut Terukur

FGD "Kupas Tuntas Perizinan" ini tidak hanya berhenti sebagai forum. Lebih dari itu, forum ini berhasil merumuskan langkah-langkah tindak lanjut yang konkret dan terukur untuk setiap permasalahan yang diangkat. Pemerintah menunjukkan komitmennya sebagai fasilitator dengan memberikan solusi langsung di tempat.

Berikut adalah rangkuman dari komitmen dan solusi yang disepakati selama FGD:

1. Percepatan Proses Tata Ruang dan Lahan

- **Pemanfaatan OSS:** Untuk isu tata ruang, Kementerian ATR/BPN mengarahkan agar pelaku usaha tetap memanfaatkan sistem OSS untuk pendaftaran lahan.
- **Surat Rekomendasi:** Bagi yang terkendala status LP2B, solusi yang diambil adalah melengkapi pengajuan KPPR di OSS dengan surat rekomendasi resmi dari Dinas Pertanian setempat. Surat ini menegaskan bahwa lahan tersebut memang diperbolehkan untuk usaha budidaya sapi dengan skala tertentu.
- **Klarifikasi Status:** Pelaku usaha yang lahannya teridentifikasi masuk kawasan KP2B atau bermasalah, akan secara proaktif bersurat resmi ke Ditjen Lahan dan Irigasi (LIP) Kementan untuk mendapatkan kejelasan dan rekomendasi status.
- **Menunggu PSN:** Khusus untuk lahan yang masih berstatus kawasan kehutanan, perusahaan akan menunggu kejelasan status melalui mekanisme Proyek Strategis Nasional (PSN) sebelum melanjutkan proses perizinan.

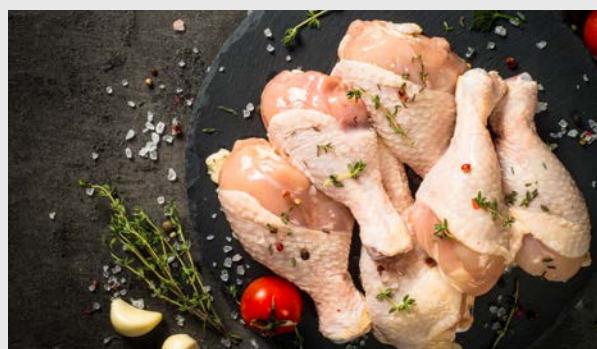
Moving Forward: Formulated Solutions and Measurable Follow-Up Actions

The "Comprehensive Review of Licensing" FGD did not stop at discussion alone. More importantly, the forum successfully formulated concrete and measurable follow-up actions for each issue raised. The government demonstrated its commitment as a facilitator by providing immediate, on-the-spot solutions.

The following is a summary of the commitments and solutions agreed upon during the FGD:

1. Acceleration of Spatial Planning and Land Processes

- **Utilisation of OSS:** For spatial planning issues, the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency (ATR/BPN) advised business actors to continue using the OSS system for land registration.
- **Recommendation Letters:** For cases constrained by LP2B status, the proposed solution is to complement the KKPR application in OSS with an official recommendation letter from the local Agricultural Service. This letter confirms that the land is permitted for cattle farming at a specified scale.
- **Status Clarification:** Business actors whose land is identified as falling within KP2B areas or facing other issues will proactively submit official correspondence to the Directorate General of Agricultural Land and Irrigation (LIP) of the Ministry of Agriculture to obtain clarity and status recommendations.
- **Awaiting National Strategic Project (PSN) Status:** For land still designated as forest areas, companies will await clarification through the National Strategic Project (PSN) mechanism before proceeding with the licensing process.

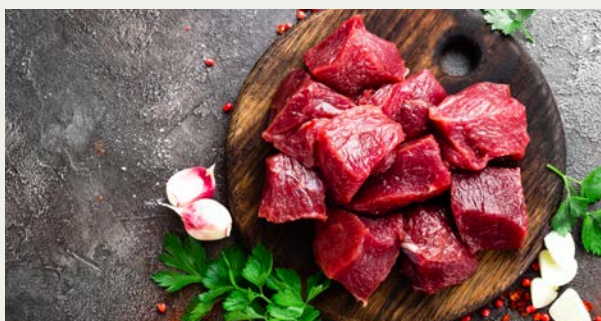


2. Fasilitasi Izin Lingkungan dan Bangunan (PBG/SLF)

- Integrasi Izin Lingkungan: Kementerian LH memberikan arahan teknis agar perusahaan segera mengintegrasikan Persetujuan Teknis (Pertek) yang telah terbit ke dalam dokumen persetujuan lingkungan yang sudah ada (existing). Kementerian LH juga akan membantu memastikan akun yang digunakan pada sistem Amdalnet sudah tepat.
- Pendampingan Izin Eksisting: Untuk bangunan eksisting yang belum memiliki PBG/SLF, Dinas PUPR di tingkat kabupaten berkomitmen untuk memfasilitasi percepatan prosesnya. Pelaku usaha didorong untuk segera menunjuk pengkaji teknis bersertifikat (PAPTI) agar kajian struktur bangunan dapat segera diselesaikan sebagai syarat di OSS.
- Koordinasi Limbah: Tindak lanjut terkait pengelolaan limbah akan dikoordinasikan lebih lanjut dengan direktorat teknis di KLHK.

3. Penguatan Koordinasi dan Aspek Sosial

- Koordinasi Daerah-Pusat: Terkait adanya sistem perizinan tambahan di daerah, Kementerian LH dan DPMPTSP Kabupaten akan berkoordinasi langsung dengan DPMPTSP Provinsi untuk menyelaraskan regulasi agar tidak tumpang tindih dengan OSS.
- Pembentukan Tim Teknis: Guna memantau progres perizinan yang kompleks, disepakati pembentukan tim koordinasi teknis yang melibatkan perusahaan, konsultan, dan dinas terkait.
- Formalisasi Kesepakatan Sosial: Menjawab isu sosial, pelaku usaha akan menempuh jalur dialog formal. Mereka akan membuat nota kesepahaman (MoU) terkait kesepakatan atas permohonan warga, yang diketahui secara resmi oleh perangkat desa dan kecamatan setempat.



Direktorat Hilirisasi Hasil Peternakan

2. Facilitation of Environmental and Building Permits (PBG/SLF)

- *Integration of Environmental Permits: The Ministry of Environment provided technical guidance for companies to promptly integrate issued Technical Approvals (Pertek) into existing environmental approval documents. The Ministry will also assist in ensuring that the correct accounts are used within the Amdalnet system.*
- *Assistance for Existing Buildings: For existing buildings without PBG/SLF, district-level Public Works Offices (PUPR) committed to facilitating an accelerated process. Business actors are encouraged to appoint certified technical assessors (PAPTI) so that structural assessments can be completed promptly as a requirement in OSS.*
- *Waste Management Coordination: Follow-up actions related to waste management will be further coordinated with the relevant technical directorates within the Ministry of Environment and Forestry.*

3. Strengthening Coordination and Social Aspects

- *Regional–Central Coordination: In relation to additional licensing systems at the regional level, the Ministry of Environment and district-level Investment and One-Stop Integrated Services Offices (DPMPTSP) will coordinate directly with provincial DPMPTSP to harmonise regulations and prevent overlap with OSS.*
- *Establishment of a Technical Team: To monitor progress on complex licensing processes, an agreement was reached to establish a technical coordination team involving companies, consultants, and relevant agencies.*
- *Formalisation of Social Agreements: To address social issues, business actors will pursue formal dialogue channels. They will prepare memoranda of understanding (MoUs) regarding agreements with local communities, officially acknowledged by village and sub-district authorities.*

Optimisme Baru Iklim Investasi

Direktur Hilirisasi Hasil Peternakan, dalam laporannya kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, menyampaikan bahwa seluruh permasalahan dan tindak lanjut ini akan terus dikawal. Penyelenggaraan FGD ini membuktikan bahwa pendekatan dialogis dan kolaboratif adalah kunci untuk mengurai sumbatan investasi. Dengan adanya fasilitasi langsung dari Ditjen PKH, para pelaku usaha mendapatkan kejelasan arah dan komitmen bantuan teknis dari berbagai kementerian dan pemerintah daerah. Langkah konkret ini diharapkan dapat mempercepat realisasi investasi di subsektor peternakan sapi perah dan sapi potong, yang pada akhirnya akan berkontribusi signifikan terhadap penguatan ketahanan pangan nasional, penciptaan lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi di sektor hilir peternakan.

Renewed Optimism for the Investment Climate

In his report to the Director General of Livestock and Animal Health, the Director of Downstream Livestock Products stated that all identified issues and follow-up actions will continue to be closely monitored. The organisation of this FGD demonstrates that a dialogic and collaborative approach is key to resolving investment bottlenecks. Through direct facilitation by Ditjen PKH, business actors have gained clarity of direction and concrete commitments for technical assistance from various ministries and regional governments. These tangible steps are expected to accelerate investment realisation in the dairy and beef cattle subsectors, ultimately contributing significantly to strengthening national food security, job creation, and economic growth in the downstream livestock sector.

